

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI SASANA PELAYANAN SOSIAL ANAK “KASIH MESRA” DEMAK

Oleh:

Erni Wigianti, Aufarul Marom

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Abandoned children in Central Java province in 2014 amounted to 66,565, but by 2015 the number has almost doubled to 120,181. Economic reasons and poverty should not be the reason for the placement of children in the institution. Policies that rely on an orphanage system have limited service coverage and are generally less likely to involve parents/families and communities. This study aims to determine the implementation, supporting factors and inhibition of abandoned children's development program in SPSA "Kasih Mesra" Demak and using qualitative descriptive approach with observation data collection techniques, interviews and documentation. Evaluation Model uses CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product), from Stufflebeam. Based on the discussion, that Context, beneficiary background is socio-economic condition with the main reason of economic factor and still lack of children assessment includes aspects of needs to family situations and alternative care. Input, the absence of professional social workers, facilities and infrastructure and the existing budget tends to be minimal. Process, children's participation in advising less involved, lack of monitoring and discussion of child development. Product, the number of beneficiaries is sufficient and right on target. Service quality is good and service goal has been reached but not maximal yet. Supporting factors: Support Dinsos Central Java Province and community assistance, Cooperation with parties/external agencies. Inhibiting factors: No professional social worker, limited facilities and infrastructure and beneficiary attitudes in the implementation of coaching activities. Recommendations: Emphasis on child assessment includes aspects of needs of family situations and alternative care. The addition of the implementation of social mental guidance. Recording and evaluation of child development every month. Data collection and submission of list of facilities and infrastructure and the need for human resources continuously and periodically to Dinsos Central Java Province. And the existence of internal training for mentors to increase the competence of social welfare of children.

Key Words: Program Evaluation, Professional Social Worker, Infrastructure, Beneficiary Attitude, Development

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha. Provinsi Jawa Tengah fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Dari data yang didapatkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bahwa jumlah anak terlantar di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 berjumlah 80.009 mengalami penurunan sebesar 16,8% pada tahun 2014 menjadi 66.565, namun pada tahun 2015 jumlahnya mengalami peningkatan 80,55 % dari jumlah tahun 2014 yaitu menjadi 120.181. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian karena dalam penanganan yang dilakukan belum mampu menurunkan jumlah anak terlantar di Jawa Tengah dan masih terdapat kendala atau faktor penyebab lain sehingga terjadi peningkatan jumlah yang signifikan.

Kemiskinan merupakan penyebab utama kerentanan anak di Indonesia. Kemiskinan menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar anak terhadap kesehatan, nutrisi, dan pendidikan yang baik. Kerentanan sebagian anak Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya pengasuhan yang memadai dari orangtua atau pengasuh mereka. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, disebutkan dalam Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” dan Pasal 34 ayat 1: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Itu artinya, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/PMKS. Sasana Pelayanan Sosial Asuhan Anak “Kasih Mesra” Demak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan untuk anak terlantar.

Untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka, banyak orangtua yang mengirim anak-anak mereka ke salah satu dari 5000-8000 lembaga pengasuhan anak yang disebut Panti yang kebanyakan adalah lembaga swasta. Meskipun Panti bisa memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan, pangan, dan tempat tinggal, tapi kebanyakan dari lembaga itu tidak banyak memberikan pengasuhan yang memadai pada anak (Kementerian Sosial, Save the Children, UNICEF, 2007). Kebijakan yang bertumpu pada sistem panti asuhan berdampak jangkauan pelayanan menjadi terbatas dan kualitas pelayanan sangat tergantung pada upaya

yang dilakukan panti tersebut, yang umumnya kurang melibatkan orang tua/keluarga dan masyarakat.

Sebelumnya, pernah ada penelitian kualitas pengasuhan anak di panti sosial asuhan anak yang dilakukan di enam provinsi pada tahun 2006 dan 2007 oleh Save the Children dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF. Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak.
- b. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Berdasarkan dari permasalahan dan uraian di atas, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra”, Demak.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Program Pembinaan Anak Terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra”, Demak.

C. TEORI

Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. (Suharmisi Arikunto, 2009:4)

Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan. (Suharmisi Arikunto, 2009:8)

Evaluasi program dalam Suharmisi Arikunto (2009:29) adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan.

- b. Tujuan dan manfaat evaluasi Program
Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan

menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

c. Model Evaluasi Program.

Model evaluasi program yang digunakan dalam penelitian ini adalah *CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product)*, dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Oleh karena itu, uraian yang diberikan relative panjang dibandingkan dengan model-model lainnya. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di Ohio State University. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

a) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

b) Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Evaluasi masukan dalam Tayibnapis (2008:14) ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.

c) Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan

yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d) Evaluasi Hasil

Ini merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari program.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penentuan informan, dapat menggunakan model *snowball sampling* dengan teknik pengumpulan data Observasi Partisipasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data Penelitian Kualitatif versi Miles dan Huberman dalam Husaini Usman dan Purnomo S.A, 2011:85 adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Evaluasi Konteks (*Context*)

Penerima manfaat di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak terdiri dari 7 anak yatim, 5 anak piatu, 4 anak yatim piatu dan 49 anak terlantar dengan jenjang pendidikan 3 di SD, 15 di SMP dan 47 di SMA dan

merupakan anak yang rawan kondisi sosial ekonomi. Rawan kondisi sosial dimana terdapat beberapa orang tua yang bercerai, pertengkaran dalam rumah tangga sehingga secara sosial hubungan keluarga tidak harmonis dan anak kurang mendapatkan perlindungan dari orang tua serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Rawan kondisi ekonomi karena orang tua kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar anaknya dengan baik, terlebih lagi untuk pendidikan. Alasan utama seringnya anak dikirimkan ke Sasana adalah karena faktor ekonomi.

Dari tahap pendekatan awal hingga penerimaan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat hal-hal yang kurang seperti halnya asesmen anak mencakup aspek kebutuhannya terhadap pengasuhan alternative dan asesmen terhadap situasi keluarga yang menjadi hambatan dalam memberikan pengasuhan. Asesmen dan identifikasi yang dilakukan pada saat survei mencakup data calon penerima manfaat, kondisi sosial, kondisi psikologis, kondisi mental spiritual, mental psikologis dan kondisi fisik, seharusnya pada tahap penerimaan terdapat asesmen lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal guna keselarasan antara karakteristik/kebutuhan penerima manfaat dengan program pembinaan yang akan dilaksanakan. Selain itu masih kurangnya penyuluhan sosial berkaitan dengan penguatan pengasuhan anak di dalam keluarga.

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak berjumlah 16

orang, dengan rincian 11 Pegawai Negeri Sipil yaitu 1 di struktural sebagai Kepala Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dengan tingkat pendidikan S2, dan 10 sebagai tenaga fungsional umum dengan tingkat pendidikan 1 SD, 1 SMP, 5 SMA, dan 3 S1. Selain pegawai negeri sipil, 5 lainnya adalah tenaga kontrak non PNS dengan tingkat pendidikan 1 SD, 3 SMA, dan 1 D1.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak belum terdapat pekerja sosial, padahal pekerja sosial sangat dibutuhkan dimana lebih berlatar belakang sosial dan lebih berkompeten di bidangnya. Pegawai berlatar belakang umum dasarnya bekerja sebagai pembimbing dengan menerapkan pola asuh yang dibawa dari rumah dan dari pengalaman selama bekerja di Sasana.

Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial profesional anak adalah pekerja sosial yang bekerja menjadi pendamping di instansi, lembaga/yayasan yang menangani permasalahan anak dan memiliki keahlian dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan keterampilan pegawai, belum semua staf/pembimbing yang ahli menggunakan komputer, sehingga

pendataan yang ada belum semua dalam bentuk *softfile* dan sebagian besar masih bersifat *hardfile*.

2) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada berupa perlengkapan administrasi, fasilitas gedung, sarana kegiatan pembinaan, sarana belajar, sarana hiburan, dan lain sebagainya.

Sarana perlengkapan administrasi, masih kurangnya ruang/tempat sebagai pengarsipan dokumen-dokumen/data yang ada dan perlunya pendataan arsip sehingga memudahkan pencarian kembali dokumen yang dibutuhkan.

Fasilitas gedung secara minimal sudah ada namun memang masih kurang, bangunan sasana dulunya didesain untuk tempat penitipan balita, yang mana kemudian alih fungsi menjadi tempat pelayanan sosial anak, bangunan kurang memenuhi standar keselamatan dan keamanan ditunjukkan dengan tidak adanya apar, untuk sarana pengasramaan di Sasana terdapat 2 asrama, dimana tempat tidurnya 2 lantai dan langsung lajur yang dilengkapi dengan almari di setiap samping tempat tidur. Tempat tidur dengan sistem asrama memang terdapat positifnya yaitu bisa mengakrabkan antar penerima manfaat, namun dalam hal ini juga kurang menjamin privasi dari setiap anak. Selain itu tidak adanya ruang kesehatan, tempat makan yang kurang untuk 65 anak sehingga sebagian anak makan diluar ruangan, ada ruang konsultasi tetapi jarang sekali digunakan dan tidak digunakannya sarana permainan bagi anak-anak balita di halaman.

Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pembinaan juga

masih minim. Ada aula yang dapat digunakan sebagai tempat pembinaan pendidikan non formal. Selain itu juga dalam penunjang kegiatan pembinaan seperti tidak adanya tempat guna membatik, meja untuk canting, mic saat qira'ah, dan lain sebagainya.

Fasilitas belajar bagi penerima manfaat disediakan 3 komputer, ada internet dan 1 printer yang hanya diperbolehkan guna mengerjakan tugas, namun terkadang printer yang ada kertas dan tintanya habis. Terkait belajar mandiri, penerima manfaat belajar di aula secara bersama-sama, dalam hal ini tidak semua anak dapat belajar dengan baik, karena setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Perpustakaanpun tempatnya kurang memadai dan buku bacaannya sangat minim.

Hiburan bagi penerima manfaat hanya disediakan 1 tv, ada sarana olahraga meja tenis di aula, tapi hanya beberapa anak yang bisa memainkannya, kurangnya sarana prasarana hiburan dan untuk berolahraga dan lain sebagainya.

3) Anggaran

Anggaran Sasana tentunya berasal dari APBD, yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi induknya. Dana yang didapatkan diolah sebagaimana mesti dan caranya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, meskipun masih terbilang minim dan belum maksimal. Selain itu memang terdapat bantuan dari pihak ketiga, namun jumlahnya tidak seberapa dan tidak untuk operasional kegiatan karena bentuknyapun lebih banyak berupa barang.

3. Evaluasi Proses (*Process*)

Fokus penilaian indikator ini berupa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang meliputi tahap pelaksanaan pelayanan, keterlibatan partisipasi penerima manfaat, hubungan antar penerima manfaat dan dengan staf/pembimbing, pengawasan dan pemantauan perkembangan terhadap penerima manfaat.

Tahap pelaksanaan pelayanan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan pendidikan formal, pelayanan pendidikan non formal, bimbingan fisik, mental sosial dan bimbingan keterampilan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, memang hampir semua kegiatan terlaksana, namun dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terkesan hanya secara formalitas dan penerima manfaat kurang mengikutinya dengan baik. Keterlibatan partisipasi penerima manfaat ada di beberapa kegiatan dan keputusan, seperti penentuan jadwal kebersihan, pemilihan sekolah, selain itu juga ada kotak saran. Namun, ada beberapa yang kurang melibatkan partisipasi anak. Pentingnya partisipasi/saran dari penerima manfaat dalam setiap kegiatan yang melibatkan mereka sebelum penentuan kegiatan tersebut agar kegiatan pembinaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan penerima manfaat dapat antusias mengikuti serta mendapat manfaatnya. Setelah program/kegiatan sudah ditentukan perlunya sosialisasi kepada penerima manfaat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan tentunya dapat dilihat dari keikutsertaan penerima manfaat dalam setiap

kegiatan, perubahan perilaku penerima manfaat ke arah yang lebih baik dan sejauh mana manfaat yang didapatkan oleh penerima manfaat.

Berkaitan dengan hubungan antar penerima manfaat komunikasi terjalin cukup baik, meski terkadang memang terdapat teman yang musiman dan kurang akrab diantara seluruh penerima manfaat. Hubungan dengan pembimbing terkadang anak kurang terbuka, jarang anak yang dekat dan curhat ke pembimbing, seringkali menyampaikan yang berkaitan mengenai kebutuhan/perengkapan. Ada beberapa penerima manfaat yang merasa pembimbing bersikap kurang adil terhadap penerima manfaat. Disinilah pentingnya bimbingan sosial yang mengarah pada relasi sosial dan sosialisasi dalam hidup bermasyarakat.

Pemantauan berkenaan dengan tata tertib, penerima manfaat memang masih sering melakukan pelanggaran seperti halnya tidak melaksanakan piket, tidak mengikuti kegiatan, rambutnya di semir, membawa hp, bolos sekolah, mengambil barang anak lain, sering ijin pulang dan lain sebagainya. Ketika terjadi hal seperti itu pembimbing akan terlebih dahulu mengingatkan, menegur, dimana pembimbing memberikan teguran dan hukuman yang mendidik agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi, namun bila terjadi kesalahan lagi akan diberi sanksi dan dipanggilkan orang tua dan diberikan surat pernyataan. Apabila memang terjadi pelanggaran/permasalahan yang krusial maka akan dibahas dalam CC (Case Conference) untuk dibahas bersama-sama guna mencari solusi terbaik. Bila memang sudah keterlalu akan dikeluarkan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap penerima manfaat yaitu adanya

ibu asrama dengan dibantu ada piket sore dan piket malam bagi pembimbing. Untuk bimbingan secara periodik dikumpulkan, disematkan disela waktu belajar diadakan bimbingan kelompok, kemudian *sharing*. Untuk perkembangan di sekolah kerjasama dengan guru BK di sekolah. Pembahasan mengenai perkembangan anak hanya ketika anak tersebut melakukan kesalahan yang krusial kemudian baru dibahas dalam forum untuk dicarikan solusi, apabila memang perlu akan didatangkan orang tuanya untuk mencari solusi terbaiknya.

Sudah ada instrument evaluasi perkembangan penerima manfaat yang mencakup aspek fisik, mental spiritual, mental psikososial, aspek sosial, dan aspek vokasional. Namun, karena tidak adanya pekerja sosial sehingga untuk data perkembangan anak secara berkala belum ada, hanya catatan dari masing-masing pembimbing. Pentingnya pengamatan, pencatatan dan evaluasi perkembangan anak setiap bulannya.

4. Evaluasi Hasil (*Product*)

1) Jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan

Pembahasan indikator ini tentang jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan, secara jumlah, penerima manfaat yang ada sudah mencukupi dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu sejumlah 65 anak. Kelompok sasaran (*target group*) merupakan individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau program. Berkaitan dengan ketepatan sasaran, dimana sasaran garapan yaitu anak (putri) yatim piatu, yatim, piatu, anak

terlantar dan rawan kondisi sosial ekonomi, penerima manfaat di sasana sudah tepat sasaran dan sesuai dengan indikator yang ditentukan, namun masih terdapat kekurangan bahwa yang mana seharusnya yang menjadi keutamaan adalah anak yang berpendidikan di SD karena akan lebih mudah untuk membentuk karakter anak dari kecil.

2) Kualitas Pelayanan

Pegawai selain menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai staf, baik secara teknis dan administratif, para pegawai juga menjalankan tugas sebagai pembimbing, dimana setiap pembimbing memiliki 5-6 anak bimbingannya, yang harus memantau dan mengetahui perkembangan setiap anak, bertindak sebagai orang tua dan lain sebagainya. Kualitas pelayanan yang diberikan pegawai sudah cukup baik melaksanakan setiap tugas sesuai dengan sop dan tupoksinya, memberikan pelayanan kepada penerima manfaat, menjalankan tugas sebagai pembimbing yang mana tentunya juga terdapat tugas tambahan di luar tugas utama, karena memang bekerja di bidang sosial harus memiliki jiwa sosial yang tinggi pula.

3) Pencapaian tujuan pelayanan

Pemenuhan kebutuhan dasar sudah terpenuhi, berupa papan, pangan dan sandang dengan adanya anggaran yang ada dilaksanakan bisa memenuhi kebutuhan anak, patokannya terpenuhi tapi belum maksimal. Anak-anak yang ada juga semakin mandiri karena memang mereka dilatih untuk hidup sederhana dan mandiri. Ada beberapa perihal yang berbeda terdapat beberapa perubahan ke arah yang lebih jelek,

dimana lebih mengarah kepada pergaulan anak itu sendiri.

Pada tahap pembinaan lanjut berupa bimbingan pemantapan usaha dan peningkatan pengembangan usaha belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran. Akhir pelayanan, terminasi yaitu pemutusan hubungan kepada eks penerima manfaat yang telah dinyatakan selesai mendapatkan program pelayanan. Eks penerima manfaat dikembalikan ke orang tua dan akan ada pelaporan ke Dinsos Kab. Demak, ketika ada relasi akan diberikan informasi untuk bekerja. Dalam hal ini, yang mana terminasi dilaksanakan selama 1 tahun setelah penerima manfaat dinyatakan mantap melaksanakan usaha/kerja, namun setelah purna asuh, pihak Sasana mengalami kesulitan dalam memantau eks penerima manfaat.

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

1) Faktor Pendukung

- a) Dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan bantuan dari masyarakat
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi induk dari sasana yang memberikan dukungan yang ada seperti sumber daya baik sumber daya manusia disertai adanya pelatihan pegawai, sarana prasarana dan dana; kegiatan pembinaan; dan lain sebagainya, serta adanya masyarakat yang ikut serta berpartisipasi memberikan dukungan, baik materi maupun motivasi, saran/masukan juga akan menjadi penunjang pelaksanaan pelayanan yang lebih baik.
- b) Kerjasama dengan pihak/instansi luar dalam pelaksanaan pembinaan

Kerjasama lintas sektoral yang ada juga dapat meningkatkan hubungan baik dan relasi antara sasana dengan pihak/instansi luar.

2) Faktor Penghambat

- a) Tidak terdapatnya kelompok jabatan fungsional yaitu pekerja sosial profesional
Pentingnya peran pekerja sosial profesional anak sebagai pekerja sosial yang bekerja menjadi pendamping di instansi, lembaga/yayasan yang menangani permasalahan anak dan memiliki keahlian dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. Pekerja sosial profesional dimana sekurangnya memiliki kualifikasi, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada kurang memenuhi standar ataupun kurang sesuai harapan maka pelaksanaannyapun akan kurang maksimal. Kurangnya sarana dalam perlengkapan administrasi, fasilitas gedung, sarana kegiatan pembinaan, sarana belajar, sarana hiburan, dan lain sebagainya.
- c) Sikap penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan
Kurangnya partisipasi anak dalam setiap kegiatan pembinaan, sikap dari penerima manfaat yang masih acuh tak acuh, malas, kurang fokus, masih terjadi pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya maka pembinaan yang ada berarti belum mampu membuat penerima manfaat mengalami kemajuan secara manfaat dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan anak terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pelayanan meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan formal, pendidikan non formal, bimbingan fisik, mental sosial dan bimbingan keterampilan. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan formal sudah terpenuhi, namun pelaksanaan kegiatan pembinaan beberapa kegiatan terkesan masih secara formalitas saja dan penerima manfaat kurang mengikutinya dengan baik. Kurangnya asesmen lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal dan kurangnya penyuluhan sosial berkaitan dengan penguatan pengasuhan anak di dalam keluarga. Beberapa keputusan akan pelaksanaan kegiatan kurang melibatkan partisipasi anak. Pemantauan berkenaan dengan tata tertib, penerima manfaat memang masih sering melakukan pelanggaran dan pembahasan mengenai perkembangan anak hanya ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan data perkembangan anak secara berkala belum ada. Selain itu, karena keterbatasan anggaran, untuk pembinaan lanjut (bimbingan pemantapan usaha kerja dan peningkatan pengembangan usaha) belum bisa terlaksana. Akhir pelayanan, setelah purna asuh, pihak Sasana kesulitan dalam memantau eks penerima manfaat.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung berupa a) dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan bantuan dari masyarakat b) Kerjasama dengan pihak/instansi luar dalam pelaksanaan pembinaan

Faktor Penghambat a) Tidak terdapatnya kelompok jabatan fungsional yaitu pekerja sosial profesional b) Keterbatasan sarana dan prasarana c) Sikap penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan

B. Saran

Faktor pendukung yang ada perlu ditingkatkan dan faktor penghambat yang ada perlu dikurangi dan diperbaiki agar pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya asesmen lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal guna keselarasan antara karakteristik/kebutuhan penerima manfaat dengan program pembinaan yang akan dilaksanakan dan perlunya peningkatan penyuluhan sosial berkaitan dengan penguatan pengasuhan anak di dalam keluarga. Selain itu pendataan dan pembaharuan data secara lengkap terhadap penerima manfaat juga harus dalam bentuk softfile, untuk memudahkan akses data ketika diperlukan. Pentingnya partisipasi/saran dari penerima manfaat dalam setiap keputusan akan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan mereka agar kegiatan pembinaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan penerima manfaat dapat antusias mengikuti serta mendapat manfaatnya.

Peningkatan pelaksanaan bimbingan mental sosial berupa penerapan senyum, salam, sapa, sopan, santun dan pembiasaan penerapan tata karma, bisa juga pelaksanaan outbond, karakter building, pemberian materi mengenai budi pekerti, bela negara dan lain-lain. Perlunya standar kompetensi

atau target dalam setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan, serta pentingnya pengamatan, pencatatan dan evaluasi perkembangan anak setiap bulannya sesuai dengan instrument perkembangan penerima manfaat yang sudah ada.

2. Pengaktifan kembali dan pembaharuan informasi di website Sasana agar informasi yang ada selalu terbaharukan dan mudah untuk diakses serta meningkatkan transparansi. Pentargetan pendataan dan pengajuan daftar sarana dan prasarana secara berlanjut dan berkala ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Selain itu perlu juga pengajuan kebutuhan akan sumber daya manusia ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara berkala dan aduan mengenai pelatihan. Serta adanya pelatihan secara intern bagi pembimbing guna peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam bidang sosial kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara

- Ismail MH. 2009. *Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia*. Malang: ASH-SHIIQY PRESS.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF. 2015. *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Jakarta
- Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan BPS RI. *Profil PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Indonesia 2011*.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2008. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program & Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan & Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- T. Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Peraturan Perundang-undangan:
Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2013-2018
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI 2015 - 2019 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Anak Indonesia, Melalui Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Keluarga Serta Masyarakat

Internet:

Indriyani, Alifah. 2014. *Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda*. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2 (2): 2306-2318
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i7cPg6DAqIJ:ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/Jurnal%2520IP%2520Indri%25202014%2520\(05-19-14-12-38-29\).doc+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i7cPg6DAqIJ:ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/Jurnal%2520IP%2520Indri%25202014%2520(05-19-14-12-38-29).doc+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id), diakses pada 27 Desember 2015 pukul 23.00

Syamsuddin, 2006. *Pekerja Sosial Profesional dan Pelayanan Lanjut Usia dalam Panti*
<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=207>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 15.05
<https://kemsos.go.id/>, diakses pada 11 November 2015, pukul 08.40